

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori jejaring kebijakan menurut Van Waarden (1992) dalam (Dedy Tardiyo, 2020) yang mengidentifikasi tidak kurang dari 7 dimensi perumusan kebijakan berbasis jaringan menurut Van Warden yaitu: 1. Jumlah dan jenis pelaku yang terlibat, 2. Fungsinya, 3. Sturkurnya, 4. Derajat pelembagaan jaringan kebijakan, 5. Aturan perilaku mereka, 6. Hubungan kekuasaan dalam jaringan, 7. Variasi berkaitan dengan strategi yang digunakan oleh anggota jaringan.

Berdasarkan 7 teori dimensi perumusan kebijakan berbasis jaringan menurut Van Waarden di atas peneliti merumuskan 4 teori dimensi perumusan kebijakan berbasis jaringan yang dipakai yaitu: 1. Jumlah dan jenis pelaku yang terlibat, 2. Fungsinya, 3. Derajat pelembagaan jaringan kebijakan, 4. Hubungan kekuasaan dalam jaringan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Jumlah dan Jenis Pelaku yang terlibat

Jejaring kebijakan pengentasan stunting di Desa Kereana menunjukkan adanya pola kolaborasi lintas sektor yang kuat dan beragam, melibatkan aktor dari tingkat kabupaten hingga masyarakat desa. Setiap pelaku memainkan peran spesifik yang saling melengkapi—mulai dari perumusan kebijakan, dukungan teknis, edukasi lapangan, hingga keterlibatan langsung warga dalam implementasi

program. Hal ini mencerminkan bahwa penanganan stunting bukan hanya tugas satu sektor, melainkan upaya bersama yang terstruktur dan partisipatif. Keberadaan berbagai aktor dalam jejaring ini juga menciptakan hubungan horizontal dan vertikal yang memperkuat sinergi dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Namun demikian, tantangan masih ditemukan, terutama terkait dengan kesenjangan kapasitas teknis dan perlunya penguatan koordinasi antar-aktor. Keberhasilan jejaring kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh jumlah pelaku yang terlibat, tetapi juga oleh kualitas komunikasi, kesinambungan komitmen, dan kemampuan menerjemahkan kebijakan menjadi aksi nyata yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas, evaluasi berkala, dan pendekatan berbasis partisipasi menjadi kunci dalam memastikan jejaring ini tetap solid dan efektif dalam menurunkan angka stunting secara berkelanjutan.

B. Fungsi

Fungsi jejaring kebijakan pengentasan stunting di Desa Kereana terbukti efektif dalam menciptakan tata kelola yang kolaboratif, responsif, dan berbasis kebutuhan lokal. Dengan pembagian peran yang jelas antara pemerintah desa, Puskesmas, kader, dan masyarakat, jejaring ini mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan dan keahlian dalam satu sistem kerja yang sinergis. Jejaring ini juga memungkinkan proses pengambilan kebijakan dilakukan secara partisipatif, berbasis data lapangan, dan disesuaikan dengan konteks sosial-budaya setempat. Fungsi koordinatif, teknis, edukatif, dan fasilitatif masing-masing aktor berjalan

secara fungsional, sehingga pelaksanaan program tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap perubahan perilaku dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Lebih dari sekadar alat koordinasi, jejaring ini juga menjalankan fungsi kontrol sosial yang memperkuat akuntabilitas dan transparansi program. Melalui forum musyawarah, pelatihan lintas sektor, serta keterlibatan aktif masyarakat, jejaring ini telah menciptakan sistem pemantauan yang kolektif dan adaptif. Perubahan pendekatan dari yang semula top-down menjadi partisipatif telah meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat, serta mendorong budaya kerja sama lintas sektor yang berkelanjutan. Oleh karena itu, fungsi jejaring kebijakan di Desa Kereana tidak hanya mendukung penurunan angka stunting, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan tata kelola desa secara menyeluruh.

C. Derajat pelembagaan jaringan kebijakan

Derajat pelembagaan jejaring kebijakan pengentasan stunting di Desa Kereana menunjukkan perkembangan yang positif dan terstruktur. Keberadaan Peraturan Desa sebagai dasar hukum, pembagian peran yang jelas antar aktor, serta forum koordinasi dan evaluasi rutin menandakan bahwa jaringan ini telah dibentuk dengan fondasi kelembagaan yang kuat. Fungsi kelembagaan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berjalan secara fungsional dalam pelaksanaan program di lapangan. Kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan data lapangan menjadi indikator bahwa pelembagaan jejaring ini telah mendorong praktik

kebijakan yang adaptif, terintegrasi, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, kekuatan kelembagaan ini masih menghadapi dinamika yang menuntut penguatan lebih lanjut, terutama dalam hal partisipasi masyarakat, kapasitas pelaksana, dan sarana pendukung. Konsistensi dan komitmen aktor lokal menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan program. Oleh karena itu, pelembagaan jejaring kebijakan harus diarahkan tidak hanya pada pemenuhan struktur dan prosedur, tetapi juga pada penguatan kultur kolaboratif dan kepemimpinan partisipatif di tingkat desa. Dengan memperkuat aspek substantif dari kelembagaan ini, jejaring kebijakan di Desa Kereana akan menjadi pilar yang efektif dalam upaya jangka panjang menurunkan angka stunting secara berkelanjutan.

D. Hubungan kekuasaan dalam jaringan

Hubungan kekuasaan dalam jejaring kebijakan pengentasan stunting di Desa Kereana menunjukkan bahwa kekuasaan tidak lagi dimonopoli oleh satu pihak, melainkan tersebar secara kolaboratif di antara berbagai aktor. Pemerintah desa tetap memegang kendali formal dalam hal kebijakan dan anggaran, tetapi pelaksanaan program sangat bergantung pada kontribusi teknis dari Puskesmas, peran lapangan dari kader posyandu, serta partisipasi aktif masyarakat. Pembagian peran yang fungsional ini menunjukkan adanya keseimbangan kekuasaan dalam jejaring, di mana keputusan diambil secara kolektif melalui musyawarah dan berdasarkan data teknis serta kebutuhan riil masyarakat.

Meskipun telah terbentuk sistem distribusi kekuasaan yang cukup sehat, jejaring ini tetap menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan peran dan komunikasi lintas sektor. Namun, keberadaan forum evaluasi rutin, pelatihan bersama, dan keterbukaan antar aktor menjadi kekuatan penting untuk meredam ketimpangan dan memperkuat sinergi. Dengan pendekatan kekuasaan yang berbasis kolaborasi, jejaring ini tidak hanya efektif dalam pelaksanaan program stunting, tetapi juga menjadi ruang pemberdayaan yang membangun kepercayaan dan komitmen bersama untuk perbaikan berkelanjutan di tingkat desa.

6.2 Saran

Sebagai upaya untuk meningkatkan jejaring kebijakan pengentasan Stunting di Desa Kereana dan membangun jaringan antar aktor yang saling melengkapi, saran-saran berikut disusun berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini. Saran ini ditujukan kepada 4 pihak utama yang memiliki peran dalam jaringan kebijakan Stunting yaitu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Puskesmas Kecamatan Botin Leobebe, pemerintah desa, masyarakat desa, Masing-masing saran diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperkuat jaringan kebijakan yang dibuat dan program yang dibuat dapat berjalan dengan efektif.

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)

- **Fasilitasi koordinasi lintas sektor secara konsisten** melalui pertemuan-pertemuan teknis antara perangkat desa, puskesmas, dan kader, agar sinergi kebijakan tetap terjaga dari perencanaan hingga evaluasi.

- **Dorong integrasi program stunting ke dalam sistem perencanaan desa** (seperti RPJMDes dan APBDes) secara tematik dan berkelanjutan agar tidak bergantung pada inisiatif tahunan semata.
- **Berikan dukungan peningkatan kapasitas teknis perangkat desa**, terutama dalam penggunaan data kesehatan untuk perencanaan program dan pengambilan keputusan berbasis bukti.

2. Puskesmas Kecamatan Botin Leobebe

- **Perkuat kemitraan dengan pemerintah desa** dalam menyusun intervensi gizi dan kesehatan agar tidak terjadi kesenjangan antara aspek teknis dan realitas sosial ekonomi masyarakat.
- **Optimalkan fungsi kader dan Tim Pendamping Keluarga (TPK)** melalui pelatihan berkala, supervisi lapangan, dan insentif yang berkelanjutan, agar kualitas layanan gizi tetap terjaga.
- **Aktif dalam forum musyawarah desa** untuk menyampaikan data dan kondisi lapangan secara objektif, sehingga menjadi dasar kuat dalam penentuan kebijakan di tingkat desa.

3. Pemerintah Desa Kereana

- **Perkuat posisi sebagai penggerak utama jejaring kolaboratif** dengan menjaga komunikasi yang terbuka dan responsif kepada seluruh aktor, serta menempatkan data teknis sebagai basis kebijakan.

- **Alokasikan dana desa secara terencana dan proporsional** untuk mendukung kegiatan posyandu, pengadaan alat ukur tumbuh kembang, edukasi gizi, dan pemenuhan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi.
- **Dorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan program** melalui forum warga atau mekanisme pelaporan terbuka untuk meningkatkan akuntabilitas dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program stunting.

4. Masyarakat Desa Kereana

- **Tingkatkan keterlibatan dalam kegiatan posyandu, kebun gizi, dan penyuluhan**, serta aktif menyampaikan kebutuhan dan masalah gizi anak kepada kader atau bidan agar program dapat lebih tepat sasaran.
- **Jaga kesinambungan perubahan perilaku keluarga**, terutama dalam hal pemberian ASI eksklusif, pola makan sehat, sanitasi, dan kehadiran rutin ke posyandu.
- **Bangun kesadaran kolektif bahwa stunting adalah masalah bersama**, bukan hanya urusan tenaga kesehatan atau pemerintah, sehingga muncul solidaritas dan komitmen sosial dalam mendukung upaya pencegahan secara mandiri.